

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN PROGRAM BANSOS SEMBAKO DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BARITO UTARA

Nor Arapah, SE.,MM
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh

Abstrak

Penelitian ini dilakukan akibat adanya fenomena wabah Covid-19 yang terjadi diseluruh negara termasuk Indonesia. Yang menyebabkan pengaruh signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban dimasyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Urgensi penelitian ini analisis pelaksanaan program bansos PKH dan sembako di tengah pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai pelaksanaan bantuan PKH dan sembako di tengah Covid-19 di Kabupaten Barito Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan, wawancara dengan pihak terkait, dan melakukan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dan program sembako di Kabupaten Barito Utara belum mensejahterakan penerima manfaat (KPM).

Kata Kunci : PKH, Covid-19, Sembako, Keluarga Penerima Manfaat.

Abstract

This research was conducted due to the phenomenon of the Covid-19 outbreak that occurred in all countries, including Indonesia. Which causes significant influence in various sectors, including the economic sector. This has led the Government to make various efforts to reduce the burden on the community, namely by providing social assistance. The urgency of this research is to analyze the implementation of the PKH social assistance program and basic foodstuffs in the midst of the Covid-19 pandemic so that it becomes an evaluation material to be able to cover aid to the affected community. The purpose of conducting the research was to gain knowledge about the implementation of PKH assistance and basic foodstuffs in the middle of Covid-19 in North Barito Regency. This type of research is qualitative research. In conducting research, the authors obtain information by making observations about the process of distributing aid, interviewing related parties, and carrying out documentation. The results of this study are that the implementation of the family hope program (PKH) and the basic food programs in North Barito district have not made the beneficiaries welfare (KPM).

Keywords: PKH, Covid-19, Basic Food, Beneficiary Families.

PENDAHULUAN

Covid 19 merupakan singkatan Corona virus 2019 yang diartikan penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia. Dunia sekarang tengah berjuang melawan pandemi covid 19 ini tentu bukan lah hal yang mudah karena penularan virus ini sangat mudah. Sedangkan di Indonesia dengan DKI Jakarta sebagai daerah kasus terpapar covid 19 terbanyak. Terdapat kurang lebih 200 negara yang telah terkena virus ini dari yang terbanyak yaitu Amerika Serikat dengan kurang lebih 186.046 orang positif corona, lalu Italia dengan 105.792 kasus, dan Spanyol sebanyak 95.923 kasus. Di Indonesia sendiri pada 10 April 2020 terdapat 3.512 kasus yang positif, sembuh 282 orang dan meninggal sebanyak 306 orang dengan fatality rate atau tingkat kematian sebesar 9,1% (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;2020). Sedangkan di Kalimantan Tengah khusus nya di Kabupaten Barito Utara jumlah kasus masih terbilang sedikit di bandingkan dengan Kabupaten lain di wilayah Kalimantan Tengah. Meski pun begitu virus covid 19 ini penyebarannya sangat cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Barito Utara harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari covid 19.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dari sisi medis di optimalkannya para tenaga medis, alat-alat medis guna mengatasi individu yang sudah terjangkit virus corona ini, dari sisi perekonomian sendiri mengalami penurunan, dari nilai rupiah yang merosot, ketersediaan bahan kebutuhan menipis dikarenakan beberapa individu yang mengalami *panic buying* (membeli barang dengan jumlah besar melebihi batas).

Pemerintah selain melakukan kebijakan penanganan medis juga membuat kebijakan program-program yang dapat membantu masyarakat. Berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti bantuan program keluarga harapan dan sembako dan lainnya yang sangat banyak di butuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 dan di salurkan dengan harapan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan tingkat penduduk miskin dan pada tahun 2019 - 2020 mengalami sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin, berdasarkan data BPS kabupaten Barito Utara, tahun 2020 naik drastis menjadi 5,17% . Kemungkinan

ini terjadi karena dampak dari pandemi covid 19 yang terjadi saat ini.

Diharapkan dengan adanya bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako di Kabupaten Barito Utara dapat mengatasi pertambahan penduduk miskin di daerah.

Pemerintah daerah dalam prioritas pembangunannya terutama untuk penanggulangan kemiskinan di tengah pandemic covid-19. Hal ini yang menyebabkan program PKH dan Program Sembako yang menjadi prioritas nasional juga menjadi prioritas di Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan paparan permasalahan dalam pelaksanaan Program PKH dan Sembako selama pandemi covid-19 oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang bansos PKH dan sembako selama pandemi covid di Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini penulis mengangkat judul “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Program Sembako Ditengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Barito Utara”.

Rumusan masalah yang didapat dari permasalahan diatas yaitu: Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Program Sembako ditengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Barito Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Program Sembako ditengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Barito Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pendekatan secara kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini di lakukan di Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan demografi kependudukan yang menerima bantuan PKH dan bantuan Program Sembako. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan data PKH dan Sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selama pandemi Covid-19 ini muncul, berbagai bentuk bantuan disalurkan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah

untuk masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Bantuan-bantuan ini sangat membantu bagi para masyarakat yang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19 ini. Bansos PKH dan Sembako merupakan 2 jenis bantuan yang berbentuk Non Tunai dan hingga saat ini penyalurannya sudah berjalan.

Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan bansos PKH dan Sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara ini peneliti menggunakan teori Implementasi program bantuan pangan non tunai yang dilihat dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Model Marilee S Grindle. Yang keberhasilannya ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan

Dalam sebuah kebijakan ataupun program kesejahteraan ini adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan jumlah kualitas hidup masyarakat, antara lain:

a. Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Dalam Bansos PKH dan Sembako ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan serta memberikan gizi yang lebih seimbang kepada masyarakat (KPM) di tengah pandemi covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan , dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama program keluarga harapan dan sembako. Masyarakat langsung merasakan bantuan yang diberikan pemerintah melalui program tersebut.

b. Manfaat yang dihasilkan

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan mengenai manfaat dari program bansos keluarga harapan dan sembako ditengah pandemi covid 19 di kabupaten Barito Utara ini bahwa

dapat disimpulkan tujuan program tersebut untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pangan telah berhasil dilaksanakan. Adapun secara rinci manfaat dari program PKH dan Sembako, yaitu:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan Pangan KPM.
- 3) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha pedagang kecil di bidang perdagangan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam suatu kebijakan atau program tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target yang ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari program implementasi bantuan PKH dan Sembako di tengah pandemi covid 19 ini adalah memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan , kesejahteraan sosial dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan bagi KPM. Derajat perubahan ini dapat langsung dilihat pada keluarga penerima manfaat (KPM).

Dari pemaparan informan, maka derajat perubahan yang diinginkan dari program keluarga harapan dan program sembako adalah:

- 1) Adanya perubahan pada tingkat perekonomian masyarakat Kabupaten Barito Utara
- 2) Terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak usia sekolah.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan kesehatan balita dan ibu hamil.
- 4) Terpenuhinya kebutuhan pokok (pangan) pada masyarakat kurang mampu.

d. Letak pengambilan Keputusan

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai koordinasi dari instansi terkait serta menjelaskan letak pengambilan keputusan yang terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.

Berdasarkan jawaban wawancara dari maka dapat dipahami bahwa koordinasi yang dilakukan dalam program keluarga harapan dan program sembako ini adalah adanya koordinasi yang dimulai dari Pihak Desa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas Sosial, kemudian berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos provinsi, selanjutnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pusat.

e. Pelaksana Program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang memfasilitasi masyarakat dalam suatu program, selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikan. Untuk mengetahui pelaksanaan program PKH dan Sembako, peneliti melakukan pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana atau implementor Program PKH dan Sembako ini terdiri dari Operator SIKS-NG, Kepala Lingkungan, Pendamping Sosial PKH, TKS Kecamatan, Koordinator Kabupaten, Koordinator Teknis, Dinas Sosial, Tim koordinasi bansos provinsi, dan tim koordinasi bansos pusat.

f. Sumber Daya yang digunakan

Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan untuk fasilitas semuanya

sudah mendukung, sedangkan Sumber Daya Manusia implementor juga merupakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan yang cukup baik untuk menjalankan program PKH dan Sembako tersebut.

2. Lingkungan Kebijakan Program

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Keberhasilan suatu program juga dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat.

Strategi implementor dalam melaksanakan program PKH dan Sembako ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dalam program PKH dan Sembako ini adalah dengan menyeleksi lagi data calon KPM yang kemudian diinput pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dikenal dengan istilah daftar tunggu. Kemudian akan diusulkan sebagai penerima bantuan setelah ada perubahan data KPM yang telah menerima bantuan, seperti KPM yang meninggal, pindah, atau bahkan sudah dikategorikan mampu.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Karakteristik *stakeholders* dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas atau implementor yang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan.

c. Tingkat Kepatuhan Dan Respon dari Pelaksana

Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Masyarakat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan

dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun ditengah pandemi covid 19.

Masyarakat merespon baik dan antusias namun masih ada beberapa warga dan pelaksana program yang dalam hal ini agen e-warong yang tidak melaksanakan program PKH dan Sembako sesuai Prosedur.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan masih ada kelompok sasaran (KPM) yang tidak patuh terhadap prosedur, agen e-warong dan operator SIKS-NG selaku implementor program juga masih belum mematuhi prosedur atau prinsip program PKH dan Sembako.

Keberhasilan program Bantuan PKH dan Sembako di tengah pandemi covid 19 dilihat berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T (6 Tepat), yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Dari data yang berhasil dihimpun diketahui bahwa di Kabupaten Barito Utara menerima program PKH dan Sembako. Salah satu tujuan dari adanya suatu program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau menjadikan keluarga miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program PKH dan Sembako di suatu daerah atau harus memenuhi seluruh indikator 6T ketepatan program PKH dan Sembako, berdasarkan data pada lapangan bahwa diperoleh data sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran

Sesuai dengan Pedoman Umum Program PKH dan Sembako bahwa sasaran program adalah Keluarga Penerima Manfaat yang dikatakan kurang mampu yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dimana KPM terdaftar di basis data aplikasi SIKS- NG. Namun pada awal (2018) program dilaksanakan pemerintah menggunakan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) tahun 2015, sehingga masih terdapat beberapa KPM yang tidak ditemukan (Meninggal atau pindah). Bahkan masih banyak KPM yang dikatakan mampu menerima bantuan sementara yang tidak mampu masih ada yang tidak menerima bantuan.

2. Tepat Jumlah

Jumlah bantuan yang diterima pada program PKH sesuai dengan komponen yang ada di dalam keluarga begitu pula bansos Sembako dengan ketentuan, yaitu Rp.200.000/KPM/bulan yang dikonversikan kedalam bentuk beras dan telur.

3. Tepat Waktu

Waktu penyaluran bantuan jika dilihat pada pedoman umum PKH dan Sembako seharusnya setiap tanggal 10, namun kenyataan di lapangan berbeda tidak ada tanggal yang pasti untuk penyalurannya karena tiap bulan berubah-ubah.

4. Tepat Harga

Pada program Sembako tidak ada perbedaan Harga Tebus Atau Harga Beras karena merupakan pola bantuan pangan yang langsung diberikan dalam bentuk kartu sehingga tidak ada perbedaan harga dalam menerima bantuan.

5. Tepat kualitas

Kualitas beras dan telur yang dialurkan kepada KPM telah memenuhi standard dan rata-rata e-warong memberikan kualitas yang terbaik sesuai dengan jumlah bantuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

6. Tepat administrasi

Untuk administrasi pada program PKH dan Sembako sudah dapat dikatakan baik. Karena semua sudah berbasis data online, seperti data KPM harus terdaftar lengkap dalam Aplikasi SIKS-NG. Selain itu setiap ada perubahan data atau perubahan penerima bantuan dan usulan baru semua harus dilengkapi dengan Berita acara dan hasil Musyawarah Desa dan Kelurahan.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Kementerian Sosial dengan tujuan jangka panjang program untuk memutus rantai kemiskinan ditengah pandemi covid 19 antar generasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan tujuan jangka pendek adalah untuk mengurangi beban RTM (Rumah Tangga Miskin) dan mempermudah akses kesehatan. PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memenuhi kriteria komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat.

Sedangkan Program Sembako adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada Kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan pangan akan disalurkan ke KPM (keluarga penerima manfaat) dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk sembako.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako ditengah pandemi covid-19 di Kabupaten Barito Utara peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle.

Dalam pendekatan Merilee S. Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat dilihat dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako ditengah pandemi covid-19 di Kabupaten Barito Utara hal ini sudah sesuai dengan teori Merilee S. Grindle. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako ditengah pandemi covid-19 di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Bantuan PKH dan Sembako Pusat, walaupun masih mengalami beberapa kendala. Kemudian tujuan program PKH dan program sembako juga sudah sejalan dengan dampak atau efek yang diterima oleh masyarakat atau disebut dengan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Barito Utara. Dampak yang diterima oleh KPM (Keluarga Penerima Masyarakat) yaitu terbantunya perekonomian dalam rumah tangga dan terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga. Tingkat perubahan perekonomian rumah tangga KPM menjadi lebih baik walaupun ditengah pandemi perekonomian KPM tidak terganggu. Masyarakat sangat merespon dengan baik program PKH dan Sembako ini bahkan mereka berharap agar

ditambah lagi kuota penerimaan bantuan PKH dan sembako ini agar seluruh masyarakat kurang Mampu di Kabupaten Barito Utara dapat menikmatinya.

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

- a. Isi kebijakan (*content of policy*), meliputi:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tentu saja sasaran dari kebijakan tersebut. Sasaran target dari program PKH dan sembako di Kabupaten Barito Utara adalah masyarakat atau yang disebut dengan istilah KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pada program PKH dan sembako ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat ditengah pandemi covid 19 melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta memberikan gizi yang lebih seimbang kepada masyarakat (KPM).

Dalam Bansos PKH dan Sembako ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan serta memberikan gizi yang lebih seimbang kepada masyarakat (KPM) di tengah pandemi covid 19.

- 2) Manfaat yang dihasilkan

Pada poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan. Manfaat dari program PKH dan sembako di Kabupaten Barito Utara yaitu, terpenuhinya kebutuhan pangan KPM, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara.

- 3) Derajat perubahan yang diinginkan

Pada program PKH dan sembako di Kabupaten Barito Utara pemerintah menginginkan perubahan

dalam kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) begitupun juga dengan masyarakat menginginkan perubahan kehidupan khususnya dalam hal perkonomian. Adapun derajat perubahan yang diinginkan dari program PKH dan sembako di Kabupaten Barito Utara, antara lain: adanya perubahan pada tingkat perekonomian masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pokok (pangan) pada masyarakat yang kurang mampu, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi bagi pedagang kecil.

4) Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada program PKH dan program sembako ini pengambilan keputusan atau pembuat kebijakan tentunya terletak pada pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mulai dari tingkat terendah yaitu pihak Desa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Tim Koordinasi Bansos PKH dan sembako Provinsi, dan Tim Koordinasi Bansos PKH dan sembako Pusat. Letak pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga jika ada terjadi kendala di lapangan yaitu di daerah maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk segera mengatasinya. Seperti penggantian status KPM, untuk mengganti status KPM maka admin atau operator SIKS-NG Kabupaten mengirim ke pusat dalam hal ini yaitu kementerian.

5) Pelaksana Program

Pada program PKH dan program sembako ini yang menjadi pelaksana program atau implementor terdiri dari: operator SIKS-NG, TKS Kecamatan, Pendamping sosial PKH, Koordinator Kabupaten, Koordinator Teknis, Dinas Sosial, Tim Koordinasi Bansos PKH dan Sembako Provinsi,

dan Tim Koordinasi Bansos PKH dan Sembako Pusat.

Secara umum pelaksana program di Kabupaten Barito Utara mendukung sepenuhnya program PKH dan program sembako

6) Sumber Daya yang digunakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang baik dan berguna untuk mensukseskan suatu kebijakan atau program. Pada program PKH dan program sembako di Kabupaten Barito Utara sumber daya yang digunakan sudah baik. Sumber daya finansial maupun fasilitas telah terpenuhi begitu juga dengan SDM implementornya. Para pendamping dan TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial) dipilih melalui tahapan seleksi. SDM para implementor merupakan orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan yang baik untuk menjalankan program tersebut.

b. Lingkungan Kebijakan (*context of policy*), meliputi:

1) Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari aktor yang terlibat

Pada implementasi program PKH dan program sembako di Kabupaten Barito Utara kekuasaan terletak pada pemerintah yang menjalankan program PKH dan program sembako dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai sasaran utama atau penerima manfaat dari program PKH dan program sembako tersebut. Sementara strategi yang dilakukan oleh para implementor untuk menjalankan PKH dan program sembako ini dengan baik yaitu dengan cara menyeleksi data calon KPM dengan baik yang kemudian dimasukkan pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dikenal dengan daftar tunggu, sehingga masyarakat yang belum menerima bantuan (calon KPM) sudah terdata. Nantinya akan diusulkan sebagai penerima bantuan setelah ada perubahan data KPM yang telah menerima bantuan, seperti KPM yang meninggal, pindah, atau bahkan sudah dikategorikan mampu. Strategi

tersebut dilakukan agar semua masyarakat kurang mampu di Kabupaten Barito Utara dapat menikmati manfaat dari program PKH dan program sembako.

2) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan atau program. Karakteristik *stakeholders* dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing implementor yang terkait dalam melaksanakan tugasnya. Rezim yang berkuasa dalam hal ini lebih ditujukan kepada pelaksana langsung di lapangan seperti pendamping sosial PKH dan TKS Kecamatan. Integritas dan kejujuran para pendamping sosial PKH dan TKS Kecamatan sangat menentukan keberhasilan program PKH dan program sembako ini.

3) Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari Pelaksana

Pada pelaksanaan program PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara tingkat kepatuhan dari implementor masih kurang baik dan ini menjadi kendala dalam implementasinya. Masih banyak operator SIKS-NG yang tidak mematuhi prosedur pelaksanaan program PKH dan program sembako. Banyak admin atau operator SIKS-NG yang sering tidak tepat waktu untuk mengirim hasil verifikasi dan validasi data kepada admin pusat sehingga akan menghambat proses pendataan. Begitu juga dengan agen atau pemilik e-warong masih ada yang mengikuti permintaan KPM padahal melanggar prinsip utama seperti pencairan dana bantuan sosial ke bentuk uang tunai, jelas hal ini sangat bertentangan dengan prinsip utama sembako yaitu bantuan sosial merupakan bantuan non tunai yang dikonversikan kedalam bentuk beras dan telur.

Peneliti juga melihat keberhasilan program PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara berdasarkan pencapaian indikator 6 Tepat atau yang dikenal dengan 6T, yang meliputi: Tepat

sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Tepat sasaran, sesuai dengan pedoman umum program PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 bahwa yang menjadi sasaran program adalah keluarga penerima manfaat yang dikatakan kurang mampu yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pada implementasinya di Kabupaten Barito Utara masih terdapat warga yang dikatakan mampu, masih menerima bantuan program PKH dan program sembako hal ini terjadi dikarenakan pada awal pelaksanaan program PKH dan program sembako tahun 2018 Pemerintah menggunakan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) tahun 2015, sehingga masih terdapat beberapa KPM yang mampu menerima bantuan bahkan KPM yang sudah meninggal dan pindah masih ada yang menerima bantuan program PKH dan program sembako walaupun hanya sebagian kecil. Permasalahannya masyarakat yang kurang mampu tidak dapat ditampung semua untuk diberikan bantuan dikarenakan kuota yang terbatas. Oleh karena itu peran operator SIKS-NG sangat diharapkan, mereka adalah salah satu kunci keberhasilan program PKH dan program sembako. Para operator SIKS-NG diharapkan aktif mengecek status KPM, sehingga jika ada KPM yang meninggal atau pindah bisa digantikan dengan calon KPM yang ada di daftar tunggu.

Tepat Jumlah, jumlah bantuan yang diterima pada program program PKH berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga dan program sembako sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 200.000/KPM tiap bulan yang dikonversikan dalam bentuk beras dan telur.

Tepat waktu, waktu penyaluran bantuan jika dilihat pada pedoman umum program PKH dan program sembako. Kalau PKH dalam 1 tahun penyaluran di bagi menjadi 4 tahap dan sembako seharusnya setiap tanggal 10 tiap bulannya, namun kenyataan di lapangan berbeda. Tidak ada tanggal yang pasti untuk penyalurannya karena tiap bulannya berubah-ubah, bahkan banyak KPM yang mengeluh karena sering terlambatnya dana masuk ke rekening mereka ada yang 3 bulan bahkan sampai 5 bulan. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi program PKH dan program sembako di kabupaten Barito Utara.

Tepat kualitas, kualitas beras yang disalurkan kepada KPM di Kabupaten Barito

Utara telah memenuhi standard. Setiap e-warong/agen memberikan kualitas yang terbaik.

Tepat administrasi, implementasi program PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara untuk administrasinya sudah baik. Semua sudah berbasis data online yang terdaftar di aplikasi SIKS-NG (*Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation*), selain itu setiap ada perubahan data harus dilengkapi dengan berita acara yang sebelumnya dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (MUSKEL).

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara dilihat dari variabel isi kebijakan sudah baik, namun dari variabel Lingkungan kebijakan, yaitu tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana masih kurang baik karena masih ada beberapa pelaksana program yang tidak bekerja sesuai dengan prinsip utama program PKH dan program sembako, sedangkan dari indikator keberhasilan program PKH dan program sembako dilihat dari 6T (6 Tepat) yang masih kurang baik yaitu dari segi Tepat Waktu. Masih banyak keluarga penerima manfaat yang mengeluh akibat keterlambatan masuknya dana bantuan kerekening KPM. bahkan keterlambatan ini terjadi hingga berbulan-bulan, hal ini sangat membuat KPM resah, apalagi pengaduan yang dilakukan KPM juga harus membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan solusinya. Keterlambatan ini juga terkadang hanya diketahui oleh pihak bank sehingga para admin atau operator tidak bisa langsung memperbaiki keadaannya karena butuh tahap demi tahap untuk melakukan laporan pengaduan.

Untuk Tepat Sasaran juga masih kurang baik karena masih ada beberapa masyarakat yang mampu masih ada yang menerima bantuan program PKH dan program sembako dikarenakan masih menggunakan data yang lama, namun perlahan terus diubah agar yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang tidak mampu. Peran dari para pendamping dan TKS sangat diharapkan karena ketidak tepat sasaran terjadi juga ada turut andil dari kepala wilayah. Pada saat melakukan verifikasi dan validasi data para kepling memanipulasi atau tidak benar-benar mengisi formulir yang telah dibagikan dengan kenyataan sebenarnya. Masih ada aparat desa

yang membagikan formulir verifikasi dan validasi data hanya kepada keluarganya atau tetangga yang dianggap dekat saja. Ini juga menciptakan kecemburuan sosial diantara masyarakat. Hal ini harus diminimalisir agar tidak lagi terjadi salah sasaran atau tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan khususnya program program PKH dan program sembako ini.

Sementara tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi sudah dapat dikatakan baik karena penyaluran program PKH dan program sembako telah sesuai dengan prinsip utama dan tujuan dari program PKH dan program sembako, selain itu KPM juga tidak ada yang mengeluhkan masalah harga, kualitas atau jumlah beras dan telur yang diberikan oleh agen e-warong. Administrasi yang dilakukan selama ini juga sudah tertib dan sudah sesuai dengan Pedoman Umum program PKH dan program sembako.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Bantuan program PKH dan program sembako hasil wawancara dengan informan di lapangan, adalah rendahnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program PKH dan program sembako, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan program PKH dan program sembako pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat.

Penerima bantuan PKH dan sembako mendapatkan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako di Kabupaten Barito Utara. Dana bantuan digunakan selain untuk pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas. Program Keluarga Harapan dan sembako membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam peningkatan pendidikan, akses kesehatan menjadi lebih mudah dan dapat memenuhi kebutuhan lansia diatas 70 tahun dan disabilitas walaupun ditengah pandemi covid-19.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako ditengah pandemi covid-19 di Kabupaten Barito Utara, belum mensejahterakan penerima manfaat PKH. Namun, Program Keluarga Harapan dan Program sembako di Kabupaten Barito Utara telah mengurangi beban rumah tangga miskin

dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat walaupun ditengah pandemi covid-19. Oleh karena itu hadirnya program ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Bantuan PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara, dari beberapa indikator yang diambil menurut teori implementasi Model Merilee S Grindle dari aspek isi kebijakan yaitu kepentingan yang mempengaruhi, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan sedangkan pada aspek lingkungan kebijakan yaitu kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, serta karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dari segi indikator keberhasilan yang dilihat dari 6T (6 Tepat) tepat sasaran, tepat harga ,tepat jumlah,tepat waktu, tepat kualitas dan tepat admiministrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa: pada tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana masih sangat rendah karena para pelaksana seperti pemimpin desa, kelurahan dan agen e-warong masih menjalankan program Bantuan PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara tidak sesuai dengan prinsip program yaitu bantuan tidak bisa dikonversikan dalam bentuk uang , namun masih ada agen e-warong yang melakukannya. Begitu juga dengan aparat desa masih ada yang memanipulasi data formulir verifikasi dan validasi data untuk keluarganya agar bisa masuk kriteria KPM. Selain itu program Bantuan PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara juga belum tepat sasaran karena masih adanya masyarakat mampu yang menerima bantuan walaupun hanya sedikit, begitu juga dalam penyaluran Bantuan PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara masih belum tepat waktu karena sering terjadi

keterlambatan hingga berbulan bulan.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Implementasi program Bantuan PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara hasil wawancara dengan informan di lapangan, adalah
 - a. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program Bantuan PKH dan program sembako, sehingga masih banyak masyarakat (KPM) yang mengalami kesalahan penggunaan ATM seperti lupa PIN. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang program Bantuan PKH dan program sembako.
 - b. Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Bantuan PKH dan program sembako pendataan masyarakat kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada yang tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat, dan dari segi ketepatan waktu masih banyak masyarakat yang mengeluh karena keterlambatan penyaluran dana.Tingkat kepatuhan yang rendah pada implementor, seperti pemilik e- warong, aparat desa, aparat kelurahan dan operator SIKS-NG. Para implementor masih banyak yang kurang patuh terhadap prosedur dan prinsip program bantuan PKH dan program sembako.

Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat , sehingga KPM memahami apa tujuan dari program bantuan PKH dan program sembako, KPM menguasai penggunaan kartu ATM, mengerti mekanisme penyaluran bantuan dan tahu kemana harus melapor ketika ada kendala yang terjadi sehingga meminimalisir kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di lapangan. Selain itu Dinas Sosial diharapkan memasang stiker penerima bantuan pada tiap rumah KPM, sehingga timbul kesadaran atau rasa malu masyarakat mampu yang masih menerima program bantuan PKH dan program sembako untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartunya, sehingga seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Barito Utara yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat

dari bantuan program bantuan PKH dan program sembako ini.

2. Pihak Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan pelaksanaan program bantuan PKH dan program sembako ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Barito Utara agar berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian sesuai dengan indikator tepat waktu dan melakukan monitoring sampai ketinggian lingkungan atau rumah KPM untuk menghindari ketidaktepatan sasaran. Serta memberikan teguran atau sanksi yang jelas kepada implementor yang melakukan penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan program bantuan PKH dan program sembako.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Arapah, N. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Dan Sembako Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemic Covid 19 Di Kabupaten Barito Utara. *JURNAL ILMU EKONOMI (MANAJEMEN PERUSAHAAN) DAN BISNIS*, 4(02), 57-65.
- Muhtadin. 2014. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)*. IAIN Syekh Nur Jati Cirebon
- Mulyono, Sri. 2006. *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis (edisi ketiga)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Fitrhi, Naylal. Kaluge, David. 2017. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No.2.
- Notoeidagdo, Rohiman. 2016 *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah
- Pratiwi, D. (2020) Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Sanjaya, R. (2020) *Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid-19 Di Kampung Parigi*. LPPM Universitas Pemulang Vol 2 No.1 Hal 14-19.
- S.Nasution. 2010. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-24 Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. Ridwan, 2013. *pengantar statistika*. Bandung : Alfabeta.
- LINK**
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*, (On-line) tersedia di: www.bps.go.id, diakses Pada Jumat, 12 Pebruari 2021 Pukul 22:06 WIB
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (On- line) tersedia di: www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/, diakses pada (Kamis, 11 Pebruari 2021 pukul 21:57 wib)
- <http://googleweblight.com?lite?url=https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada tanggal 12 Pebruari 2021 pukul 20:18 WIB
- <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada tanggal 17 Pebruari 2021 pukul 22:34 WIB
- Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021 sumber: www.kemensos.go.id diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul: 18:52 WIB
- Panduan Umum, *Program Sembako*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2021)
- Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di tnp2k.go.id/id/program/sekilas/, diakses pada tanggal 12 Pebruari 2021, pukul 10:28 WIB
- www.kemensos.go.id/programkeluargaharapan, diakses pada 15 Pebruari 2021 pukul 20:04 wib
- www.kemenkes.go.id